

EDISI  
JULI - AGUSTUS 2020  
TAHUN XII



LEGISLASI  
Hal. 9

Pengendalian Alih  
Fungsi Lahan, DPRD & Pemprov Tetapkan Perda



AGENDA  
Hal. 12

DPRD Sumbar  
Gelar Rapat Evaluasi Realisasi APBD Semester 1



DITERBITKAN OLEH HUMAS DPRD  
SUMATERA BARAT



# MIMBAR

DPRD SUMATERA BARAT // ASPIRATIF - RESPONSIF - INOVATIF

## BERJUANG DI TENGAH PANDEMI COVID-19

DPRD & PEMPROV SUMBAR  
FOKUS PULIHKAN EKONOMI  
MASYARAKAT



# Pengantar Redaksi

Edisi Majalah MIMBAR kali ini, Redaksi merangkum dan menyajikan berbagai kegiatan kedewanan pada masa sidang kedua, hingga kegiatan di masa reses. Baik kegiatan pimpinan, rapat - rapat serta kegiatan kunjungan ke daerah - daerah dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat dan meninjau pelaksanaan program pembangunan daerah.

Masa sidang kedua DPRD, masih berlangsung di tengah wabah pandemic Covid-19. DPRD bersama pemerintah daerah masih berupaya semaksimal mungkin untuk mengefektifkan penanganan Covid-19 sekaligus mendorong pemulihan ekonomi. DPRD mendorong agar program pembangunan yang masuk ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) berorientasi kepada pemulihan ekonomi.

Dari sisi legislasi, DPRD juga mendorong lahirnya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai payung hukum penerapan protocol kesehatan dalam memulihkan aktivitas masyarakat dan perekonomian yang aman dari wabah pandemic Covid-19.

Komisi - komisi secara spesifik membahas program - program pemulihan ekonomi serta melakukan kunjungan ke masyarakat. Begitu juga secara perorangan, anggota DPRD memantau kondisi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing - masing sambil menggali aspirasi masyarakat untuk dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah.

Selain itu, DPRD juga beberapa kali menerima kunjungan kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi ke DPRD. Diantaranya mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang pendidikan SMA dan SMK pada awal Juli 2020 lalu. Ada juga kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk diteruskan ke pemerintah pusat mengenai RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Di tengah masih mewabahnya Covid-19, DPRD terus berupaya memaksimalkan kinerja termasuk di sisi legislasi. Beberapa Peraturan Daerah (Perda) berhasil dituntaskan dan ditetapkan serta beberapa Ranperda juga dikebut pembahasannya. Redaksi mencoba menyajikannya pada rubric Legislasi.

Kritik dan saran anggota DPRD tentang berbagai persoalan disajikan pada rubrik fokus dan sorot. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan berbagai program pembangunan daerah ke depan.

Redaksi menyadari, masih banyak yang luput dari rangkuman sehingga tidak seluruhnya program kegiatan DPRD yang disajikan pada edisi kali ini. Keterbatasan ruang dan tenaga menjadi salah satu kendala, namun Redaksi akan berupaya secara maksimal agar ke depan informasi yang disampaikan kepada masyarakat pembaca bisa lebih lengkap dan lebih dalam. Untuk itu, Redaksi sangat terbuka menerima kritik dan saran dari masyarakat pembaca. Salam Redaksi, Lazwardi, Pimpinan Redaksi

## SUSUNAN REDAKSI MIMBAR DPRD PROV SUMBAR

Penasehat :  
Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat  
Kelengkapan DPRD

Penanggungjawab :  
SUPARDI  
(Ketua DPRD Prov. Sumbar)

Wakil Penanggungjawab :  
H. IRSYAD SYAFAR, Lc  
(Wakil Ketua DPRD Prov. Sumbar)  
H. Suwirpen Suib, S. Sos  
(Wakil Ketua DPRD Prov. Sumbar)  
H. Indra Dt Rajo Lelo, SH, MM  
(Wakil Ketua DPRD Prov. Sumbar)

Pengarah :  
H. Rafis, SH, MM  
(Sekretaris DPRD Prov. Sumbar)

TIM Redaksi  
KETUA :  
H. Jon Lizar, SH, M.Si  
(Kabag Persidangan)

Anggota :  
Laswardi, SH, M.Hum  
Elvi Yanos Alpa, SH, M.AP  
Absidefi Mulyani, S.Sos  
Arnelly Amran, S.Sos  
Deny Suryani, S.IP  
Pendika Saputra  
Suhendri  
Yopi Ismed, S.Kom  
Pebrus Dwinus

Konsultan  
Padangmedia.com

Sekretariat Redaksi: Humas DPRD Provinsi  
Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang, Sumbar  
Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593  
Fax: (0751) 7059328  
Website: <http://www.dprd-sumbarprov.go.id>



# Sekapur Sirih Sekwan



**M**emasuki masa sidang kedua tahun 2020, DPRD terus memaksimalkan kinerja, di tengah wabah pandemic Covid-19 yang masih berjangkit. DPRD memfokuskan kegiatan kepada upaya mendorong pemerintah daerah menyusun program kegiatan yang berorientasi kepada pemulihan ekonomi.

Meski masih di tengah wabah, kegiatan kedewanan hingga akhir masa sidang kedua cukup padat terutama membahas rencana kebijakan umum perubahan anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (RKUPA PPAS). Seperti diketahui, KUPA PPAS merupakan acuan dalam menyusun perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P).

Selain itu, beberapa Ranperda juga berhasil dituntaskan pembahasannya dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Disamping mulai membahas beberapa Ranperda yang akan dilanjutkan pada masa sidang ketiga, termasuk Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang sangat dibutuhkan sebagai payung hukum bagi penegakan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Tujuannya, agar masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti biasa namun tetap aman di tengah wabah yang belum

berakhir

Dalam menggelar rapat - rapat di dalam ruangan, anggota DPRD tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sekretariat DPRD mempersiapkan ruang rapat yang sesuai dengan standar kesehatan. Peserta rapat dibatasi untuk mengurangi kapasitas ruangan. Selain itu, beberapa agenda rapat terutama rapat paripurna dilakukan secara virtual.

Seluruh kebutuhan terhadap fasilitas yang sesuai dengan standar Covid-19 tersebut dipersiapkan oleh sekretariat agar kegiatan DPRD tidak menimbulkan kluster baru dalam penyebaran virus corona. Demikian juga pada saat kunjungan lapangan komisi - komisi, seluruh anggota DPRD turun dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan tidak terlalu ramai. Sebaliknya, anggota DPRD mengunjungi masyarakat secara perorangan ke daerah pemilihan masing - masing mengisi masa istirahat bersidang untuk menampung aspirasi masyarakat.

Beberapa agenda penting DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa sidang kedua antara lain telah menetapkan beberapa Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda). Seperti Perda Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dan Perda Per-

lindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Juga telah membahas dan menuntaskan RKUPA PPAS APBD tahun 2020.

Selain itu, DPRD juga terus memantau kegiatan pemerintah provinsi dalam penanganan Covid-19. Secara kelembagaan maupun perorangan, DPRD memberikan saran dan masukan dengan tujuan agar penanganan dapat berjalan efektif dan maksimal.

Berakhirnya masa sidang kedua tahun 2020, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah ditunggu tumpukan tugas yang harus dituntaskan pada masa sidang ketiga. Masa sidang kedua ditutup dengan laporan pelaksanaan reses anggota DPRD dimana didalamnya tercantum berbagai aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun untuk diakomodir di dalam program pembangunan daerah sesuai skala prioritas.

Semoga pada masa sidang ketiga, kegiatan kedewanan dapat berjalan lebih maksimal lagi dan wabah pandemic Covid-19 mulai mereda. Pembahasan RAPBD perubahan dan RAPBD tahun 2021 telah menunggu untuk dituntaskan. Sekretaris DPRD

